

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu proses dimana perekonomian suatu negara berkembang ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu disebut Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan pendapatan nasional yang mencerminkan peningkatan kapasitas produktif perekonomian dapat disebut juga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara, yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi ketika output perekonomian meningkat selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain teknologi, tenaga kerja, investasi, konsumsi, pendapatan, pengeluaran, dan sumber daya keuangan (Frieria et al., 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis. Sementara output perkapita mengaitkan aspek output total dan aspek jumlah penduduk. Perlu diperhatikan pula perkembangan teknologi dengan tingkat keahlian dan pendidikan penduduk agar selaras mendukung pertumbuhan ekonomi (Jatmiko, 2019). Sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan ekonomi dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (Palguno et al., 2020).

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan dalam suatu negara, yang sering kali disebabkan oleh adanya

peningkatan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Sukirno menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi menandakan adanya perubahan positif dalam tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara (Sukirno, 2016).

Menurut Sukirno (2016) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu:

- 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA),
- 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi,
- 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja,
- 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb.

Hal ini selaras dengan teori ekonomi neo-klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru. Sementara itu dalam analisis makro dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian yaitu : konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah,

pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan export netto (ekspor dikurangi impor).

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Brebes, pertumbuhan ekonomi mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah pendapatan daerah dan belanja pemerintah. Pendapatan daerah yang optimal dapat memberikan sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, sedangkan belanja pemerintah yang efisien dapat meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Antara tahun 2014 hingga 2023, Kabupaten Brebes mengalami berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, dan sumber daya alam memiliki potensi untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Sementara itu, belanja pemerintah yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sangat berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Namun, meskipun ada potensi yang besar, belum tentu pertumbuhan ekonomi selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah dan belanja pemerintah. Faktor eksternal seperti kondisi perekonomian nasional, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan pemerintah pusat juga turut memengaruhi dinamika ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami hubungan antara pendapatan daerah, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes dalam rentang waktu tersebut.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai. Tinggi rendah laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti turunnya kesejahteraan ekonomi. Disisi lain tingkat pertumbuhan ekonomi juga digunakan untuk mengevaluasi tepat atau tidaknya kebijakan yang telah diambil sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian (Vol,

2017). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai seberapa besar pengaruh pendapatan daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes, serta memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai. Produk Domestik Regional Bruto di daerah tersebut. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya. Menurut Tambunan, T, (2015) mengungkapkan PDRB dapat digunakan untuk mengukur kontribusi ekonomi setiap sektor di berbagai daerah, serta bagaimana indikator ini mengukur pertumbuhan ekonomi dan efektivitas suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan PDRB terbagi menjadi dua yaitu, PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan Ekonomi ini yang sering di ukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Terdapat dua cara penyajian angka PDRB, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahunnya, dan PDRB atas dasar harga konstan yang menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Jika PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi tahunan, maka PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur dan pergerakan ekonomi (Mankiw, 2016). Berikut data mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dilihat dari sisi pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab Brebes 2014-2023

No	Tahun	Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Rupiah)
1	2014	30.899.921,71
2	2015	34.444.079,42
3	2016	37.448.715,50
4	2017	39.963.111,45
5	2018	42.973.395,36
6	2019	46.178.657,58
7	2020	47.058.595,60
8	2021	48.966.236,57
9	2022	53.708.851,77
10	2023	57.599.157,45

Sumber: BPS Kab Brebes, tahun 2024

Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Brebes Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 Tahun 2023 merupakan tahun dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp. 57.599.157,45. Data menunjukkan bahwa nilai PDRB meningkat secara konsisten, mencerminkan perkembangan ekonomi yang baik di wilayah tersebut. Pertumbuhan ini menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PDRB di Brebes adalah sektor pertanian. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Peningkatan hasil pertanian dan diversifikasi produk pertanian telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga memberikan dampak positif pada nilai PDRB. Selain sektor pertanian, sektor industri juga mengalami perkembangan yang signifikan. Investasi dalam industri pengolahan dan manufaktur meningkat, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang lebih baik, para pelaku industri semakin berani berinvestasi di

Kabupaten Brebes, yang berkontribusi pada pertumbuhan PDRB. Sektor jasa, terutama pariwisata, juga mulai menunjukkan potensi yang besar. Dengan berbagai daya tarik wisata alam dan budaya, Brebes menarik lebih banyak pengunjung. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya mendongkrak pendapatan daerah tetapi juga menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan PDRB.

Pendapatan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak dan retribusi, berperan penting dalam mendukung pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang berasal dari potensi suatu daerah, digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip desentralisasi. PAD memberi kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendanaan berdasarkan potensi wilayahnya. Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan mempertimbangkan besaran PAD yang diterima. Semakin besar PAD, semakin besar peluang untuk meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, mereka perlu berupaya maksimal dalam meningkatkan PAD (Adyatama & Oktaviani, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut perundang-undang Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan menjadi lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Dana perimbangan dipisahkan menjadi empat jenis yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Perimbangan Provinsi

Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum dan dana alokasi khusus akan berkurang apabila pendapatan asli daerah cukup besar (Chandra dkk, 2017). Berikut ini adalah penyajian dalam tabel kontribusi dana perimbangan yang diterima Kabupaten Brebes dari pemerintah pusat:

**Tabel 1.2 Realisasi Dana Perimbangan
Kab. Brebes Tahun 2014-2023**

No	Tahun	Realisasi Dana Perimbangan
1	2014	1.337.754.199.863
2	2015	1.387.121.910.800
3	2016	1.747.009.661.841
4	2017	2.327.826.988.712
5	2018	1.994.485.790.600
6	2019	2.106.133.167.436
7	2020	2.421.030.756.688
8	2021	2.456.463.471.667
9	2022	1.850.513.017.766
10	2023	1.982.277.753.553

Sumber: BPKAD Kab Brebes, tahun 2024

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat penyajian data realisasi dana perimbangan kabupaten Brebes selama sepuluh tahun dari tahun 2014 hingga 2023. Dana

perimbangan Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi tiaptahun. Dari jumlah total tersebut pada tahun 2021 penerimaan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 2.456.463.471.667, karena pada tahun ini pemerintah pusat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19. Kabupaten Brebes mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari potensi daerah masing-masing merupakan tambahan dana keseimbangan. Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 (Adisasmita, 2016).

Sumber pendanaan pemerintah bergantung pada fungsi pendapatan asli daerah, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk meningkatkan jumlah dana daerah yang tersedia untuk digunakan dalam berbagai inisiatif pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah. Jumlah uang yang dimiliki pemerintah daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya PAD, demikian pula derajat otonomi daerah. Peningkatan belanja modal biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah, namun hal ini tergantung pada kondisi daerah pada saat tahun anggaran. Hal ini akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah dan jumlah pengeluaran untuk Belanja Modal, sehingga semakin memperluas kewenangan daerah untuk mengarahkan penggunaan dana daerah sesuai dengan rencana yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Tabel berikut menunjukkan tingkat pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Brebes:

**Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kab. Brebes Tahun 2014-2023**

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1	2014	267.770.613.635
2	2015	301.953.709.817
3	2016	339.156.063.168
4	2017	523.660.773.731
5	2018	346.907.972.510
6	2019	379.091.298.714
7	2020	392.541.730.819
8	2021	518.511.128.704
9	2022	419.395.415.995
10	2023	479.936.145.391

Sumber: BPKAD Kab Brebes, tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat dari penyajian data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes yaitu tahun 2014-2023, terlihat bahwa gambaran Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 523.660.773.731 dan pendapatan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 267.770.613.635

Tidak ada perbandingan yang signifikan antara pendapatan daerah dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah; dana perimbangan lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan kemampuan untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan masih bergantung pada pemerintah pusat untuk mendapatkan pendapatan.

Namun dengan berbagai capaian tersebut, diharapkan daerah dapat memanfaatkan anggaran pemerintah pusat secara maksimal, yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan

Dana Bagi Hasil. Dengan demikian, pembiayaan daerah akan menjadi tolok ukur dan motivasi untuk mengeksplorasi potensi mereka.

Dalam era desentralisasi, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu cara agar pemerintah dapat melakukan tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut: tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan uang. Belanja ini dibagi menjadi dua kategori: baik belanja langsung maupun tidak langsung. Sementara belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan kegiatan program pemerintah, belanja langsung terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Statistik anggaran belanja pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2014–2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Realisasi Belanja Pemerintah
Kab. Brebes Tahun 2014-2023**

No	Tahun	Realisasi Belanja Pemerintah
1	2014	1.967.168.957.601
2	2015	2.392.376.921.588
3	2016	2.946.269.402.281
4	2017	2.319.952.315.323
5	2018	2.281.597.170.055
6	2019	2.471.256.601.337
7	2020	2.955.050.373.005
8	2021	3.126.226.470.518
9	2022	3.091.285.559.556
10	2023	2.989.014.635.072

Sumber: BPKAD Kab Brebes tahun 2024

Terlihat dari Tabel 1.4 yang menyajikan data belanja pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2014 sampai dengan tahun 2023, bahwa gambaran belanja pemerintah secara keseluruhan mengalami perubahan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021 belanja pemerintah akan mencapai yang tertinggi yaitu Rp. 3.126.226.470.518 dan pengeluaran terendah terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.967.168.957.601.

Dengan penerimaan daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan belanja pemerintah untuk menjaga kemakmuran masyarakat dan meningkatkan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal ini bertujuan untuk menstabilkan harga, menurunkan tingkat output, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pengeluaran pemerintah mencakup keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menawarkan barang dan jasa publik dan kumpulan barang yang dibuat oleh pemerintah, ada korelasi yang cukup besar antara pengeluaran ini dan pertumbuhan ekonomi. Penunjukan anggaran di tingkat pusat, provinsi, dan daerah digabungkan untuk membentuk total pengeluaran pemerintah.

Meskipun sejumlah penelitian seperti penelitian Agung Priambodo, yang menganalisis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, telah membahas pengaruh pendapatan daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian Ambrosya Fiera, yang menganalisis tentang pengaruh belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, masih terbatas studi yang secara spesifik menganalisis hubungan tersebut di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Brebes. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara simultan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam rentang waktu yang panjang dan dengan data terkini. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui studi ini

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Pengaruh Pendapatan Daerah dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes (Tahun 2014 -2023)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Sejauh mana pendapatan daerah dari pajak memengaruhi kapasitas pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan

2. Bagaimana alokasi belanja pemerintah di berbagai sektor (seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara peningkatan pendapatan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes selama periode 2014-2023

C. Batasan Masalah

Melihat identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan tentang dampak pendapatan daerah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan permasalahan tersebut di atas. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada tahun 2014–2023 di Kabupaten Brebes.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 - 2023?
2. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 - 2023?
3. Apakah Pendapatan Daerah dan belanja pemerintah secara bersamaan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 - 2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian:

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 – 2023
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 – 2023

3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah dan belanja pemerintah secara bersamaan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes periode tahun 2014 – 2023

Manfaat Penelitian

1. Perencanaan Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan menekankan sektor-sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes.

2. Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik terkait persoalan pertumbuhan ekonomi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan pendapatan dan belanja dengan memahami pengaruh kedua faktor ini, pengambilan kebijakan dapat merancang strategi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, pemahaman dan memberikan gambaran umum pada pembaca tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini dijelaskan secara garis besar berkaitan dengan permasalahan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini akan dijelaskan landasan atau kajian teori mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan

menggunakan grand theory, literature review, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan membahas rencana dan prosedur penelitian yang akan dilaksanakan peneliti bertujuan untuk menjawab hipotesis penelitian, diantaranya waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi mengenai hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dijelaskan dan dianalisis.

BAB V PENUTUP, bab ini adalah bagian akhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran yaitu mengenai rekomendasi dari peneliti dari masalah yang diteliti berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.